



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1096 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selanjutnya disebut Tim Zona Integritas (ZI), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Zona Integritas (ZI) sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Zona Integritas (ZI) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 22 April 2024



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- a. Menteri Agama Republik Indonesia;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR           TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA UIN  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

1. Pengarah : Prof. Dr. As'ad, M.Pd.
2. Penanggung Jawab : 1. Dr. H. Zikwan, M.Ag  
2. Dr. Ayub Mursalin, S.Ag., M.A  
3. Dr. Jamaluddin, S.Ag., M.Pd.I  
4. Pahmi SY, S.Ag., M.Si
3. Ketua : Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc. M.Pd
4. Sekretaris : Dr. H. Helmi, M.Ag
5. Keanggotaan
  - I. Bidang Manajemen Perubahan
    1. Dr. Tanti, S.Si., M.Si (Ketua LPM)
    2. Azizi, S.Kom., M.S.I (Kepala Bagian Umum)
    3. Ratna Sumarni, S.E (Ketua Tim Kerja Bidang Fungsi Perencanaan dan Keuangan Pada Biro AUPKK)
    4. Sri Rezeki, S.Ag (Ketua Tim Kerja Bidang Fungsi Organisasi dan Kepegawaian Pada Biro AUPKK)
    5. Zakiah, S.Ag., M.Pd.I (Ketua Tim Bidang Fungsi Humas dan Kerjasama pada Biro AAKK)
  - II. Bidang Penataan Tatalaksana
    1. Titin Agustin Nengsih, S.Si (Kepala UTIPD)
    2. Fakhrul Razy, S.Psi (Asesor SDM Aparatur)
    3. Gusti Harneli, S.Pd.I (Arsiparis Ahli Muda)
    4. Safitri Handayani, S.IP (Pranata Humas Ahli Pertama)
    5. Dedi Setiawan, S.E (Tim SPI)
  - III. Bidang Penataan Manajemen SDM
    1. Tabroni, S.Ag., M.Pd.I (Koordinator Pusat Pengembangan SDM)
    2. Khairi Muslimah, S.Pd., M.Pd.I (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)
    3. A. Fitriyani, S.STP (Arsiparis Ahli Pertama)
    4. Heri Saputra S.E. (Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama)
  - IV. Bidang Penguatan Akuntabilitas
    1. Risye Martarika, M.E (Perencana Ahli Muda)
    2. Lia Anggraini, S.E (Perencana Ahli Muda)
    3. Ilma Zihni, S.E (Tim SPI)
    4. Drs. Sururuddin, M.Pd (Lembaga Penjaminan Mutu)
    5. Riya Rahmi, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)



V. Bidang Penguatan Pengawasan

1. Ahmad Syahrizal, M.E (Sekretaris SPI)
2. Ardi Winata, S.HI., MH (Pustakawan Ahli Muda)
3. Shintawati, M.Pd.I (Lembaga Penjaminan Mutu)
6. Kasmardin, S.E., M.Ak (Tim Bidang Fungsi Perencanaan dan Keuangan)

VI. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Saparuddin, S.Pd.,M.Pd (Kepala Bagian Akademik Biro AAKK)
2. Gusriani, S.Sos (Kasubbag TU dan Rumah Tangga)
3. Jannatun Nasir, S.Ud (Analisis Kebijakan Ahli Pertama)
4. Budi Prasetyo, S.E (Tim Bidang Fungsi Humas dan Kerjasama)



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1096 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA UIN  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Tim Kerja mempunyai tugas :

**1. Penanggung Jawab :**

- a) Memutuskan kebijakan tentang penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja/ UPT
- b) Memantau kemajuan atas realisasi penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, Semester dan Tahunan Satuan Kerja/ UPT
- c) Memberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja UPT
- d) Melakukan submit PMPZI kepada unit eselon I terkait paling lambat tanggal 31 Desember

**2. Ketua :**

- a) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja
- b) Menyusun rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan program kerja yang telah disepakati
- c) Melakukan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja/ UPT
- d) Melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan
- e) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja/ UPT dilingkungannya ;
- f) Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI secara berkala baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama
- g) Mengkoordinasikan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI
- h) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik ;
- i) Mengagendakan pelaksanaan submit PMPZI setiap akhir tahun penilaian ;
- j) Melaporkan hasil pelaksanaan submit PMPZI setiap akhir tahun penilaian ;
- k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan satuan kerja/UPT



### 3. Sekretaris

- a) Mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan
- b) Mengelola administrasi penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja
- d) Menyiapkan bahan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan program kerja yang telah disepakati ;
- e) Menyiapkan bahan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja/ UPT;
- f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan ;
- g) Menyiapkan bahan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja/ UPT
- h) Menyiapkan bahan penilaian mandiri pembangunan ZI secara berkala baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama
- i) Menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan dokumen pembangunan ZI
- j) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik ;
- k) Menyiapkan bahan pelaksanaan submit PMZI setiap akhir tahun penilaian
- l) Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan Kerja / UPT

### 4. Anggota :

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan program unit kerja masing-masing
- b) Memberikan masukan bahan rumusan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai program unit kerja masing-masing ;
- c) Menyampaikan informasi terkait perkembangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM unit kerja masing-masing ;
- d) Memberikan saran dan masukan terkait pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada ketua.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,





## LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2024

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS		
Tahun PMPZI	:	2024
Kode>Nama Satker	:	/
Penanggungjawab	:	
Provinsi	:	
Waktu Pengisian	:	01 Jan 1970

Penilaian	Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
<b>A. PROSES (60%)</b>			0	0%	
<b>I. MANAJEMEN PERUBAHAN (8%)</b>			0	0%	
1. Tim Kerja (1%)			0	0%	
a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	0		
b.	Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas?	a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi.	0		
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (2%)			0	0%	
a.	Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	0		
b.	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM ?	a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.	0		
c.	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala; b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala; c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.	0		
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2%)			0	0%	
a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana.	0		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas ?	a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala; d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas.		0		
	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?	a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti.		0		
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3%)				0	0%	
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.		0		
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; c. Jika belum terdapat agen perubahan.		0		
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi ?	a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan; b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir.		0		
	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto, banner, poster dll) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster dll); c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster dll); d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.		0		
<b>II. PENATAAN TATALAKSANA (7%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
1. prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2%)				0	0%	
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi ?	a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.		0		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan ?	a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi.		0		
	c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi ?	a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi; e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.		0		
2. E-Office (4%)				0	0%	
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi ?	a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi.		0		
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi ?	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.		0		
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi ?	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi.		0		
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik ?	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.		0		
3. Keterbukaan Informasi Publik (1%)				0	0%	

Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ?	a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik.		0		
	b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik ?	a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan.		0		
<b>III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5%)				0	0%	
	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan ?	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.		0		
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan ?	a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.		0		
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja ?	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.		0		
2. Pola Mutasi Internal (1%)				0	0%	
	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan ?	Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai		0		
	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.		0		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.		0	
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5%)				0	0%	
	a.	Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi		0	
	b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai ?	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.		0	
	c.	Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan ?	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%.		0	
	d.	Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya ?	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.		0	
	e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai.		0	
	f.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja ?	a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan.		0	
4. Penetapan kinerja individu (4%)				0	0%	

Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi ?	a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP); b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi.		0		
	b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ?	a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logic model; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya; d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya.		0		
	c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik ?	a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan; c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.		0		
	d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll) ?	Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		0		
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5%)				0	0%	
	a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan ?	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.		0		
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0,5%)				0	0%	
	a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala ?	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.		0		
<b>IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
1. Keterlibatan pimpinan (5%)				0	0%	
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan ?	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan.		0		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja ?	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja; c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja.		0		
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ?	a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan; b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan; c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja; d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja.		0		
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5%)				0	0%	
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada ?	ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap.		0		
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ?	ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.p>		0		
	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) ?	ya, jika unit kerja memiliki IKU.		0		
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART ?	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.		0		
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu ?	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.		0		
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ?	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja.		0		
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ?	ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.		0		
	h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten ?	a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten.		0		
<b>V. PENGUATAN PENGAWASAN (15%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
1. Pengendalian Gratifikasi (3%)				0	0%	
	a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi ?	a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala; c. Jika belum dilakukan public campaign.		0		
	b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan ?	a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.		0		
2. Penerapan SPIIP (3%)				0	0%	

Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian ?	a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.		0		
	b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan ?	a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko.		0		
	c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi ?	a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko.		0		
	d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait ?	a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait.		0		
3. Pengaduan Masyarakat (3%)				0	0%	
	a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan ?	a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.		0		
	b. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan.				
		a. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		Jumlah Dumas		
		b. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		Jumlah Dumas		
		c. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		Jumlah Dumas		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ?	a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala; c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi.		0		
	d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ?	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti.		0		
4. Whistle-Blowing System (3%)				0	0%	
	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja.		0		
	b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan ?	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System.		0		
	c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System ?	a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi.		0		
	d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti ?	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti.		0		
5. Penanganan Benturan Kepentingan (3%)				0	0%	
	a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama ?	a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.		0		
	b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi ?	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan.		0		

Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ?	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan.		0		
	d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan ?	a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja.		0		
	e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ?	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja.		0		
<b>VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
1. Standar Pelayanan (3%)				0	0%	
	a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan ?	a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan.		0		
	b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumkan ?	a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika belum terdapat standar pelayanan yang telah dimaklumkan.		0		
	c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ?	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum mempunyai SOP tentang pelaksanaan standar pelayanan.		0		



Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	d. Apakah telah dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ?	a. Jika unit kerja melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; b. Jika unit kerja melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.		0		
2. Budaya Pelayanan Prima (3%)				0	0%	
	a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima ?	a. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan; b. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian besar pegawai yang memberikan pelayanan; c. Jika sudah terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada sebagian kecil pegawai yang memberikan pelayanan; d. Jika belum terdapat sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.		0		
	b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media ?	a. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); b. Jika informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); c. Jika informasi pelayanan belum dapat diakses melalui berbagai media.		0		
	c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ?	a. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; b. Jika telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan; c. Jika belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.		0		
	d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi ?	a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi; d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi.		0		
	e. Apakah terdapat inovasi pelayanan ?	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat; c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada; d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah; e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan.		0		
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4%)				0	0%	

Penilaian		Penjelasan	Jwb	Nilai	%	Nama/Nomor Dokumen Pendukung
	a.	Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ?		0		
	b.	Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka ?		0		
	c.	Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat ?		0		
<b>TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT (60%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>B. HASIL (40%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
	1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15%)	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0-4)	0	0	0%
	2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5%)	0-100%	0	0	0%
<b>II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20%)	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0-4)	0	0	0%
<b>TOTAL KOMPONEN HASIL (40%)</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM</b>				<b>0</b>		